

PENGARUH PERENCANAAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGAWASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dedy Afrianto¹; Sunardi²; Nanik Sisharini³

Universitas Merdeka Malang, Indonesia^{1,2,3}

Email : afriantodedy76@gmail.com¹; pasca@unmer.ac.id^{2,3}

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perencanaan, transparansi dan akuntabilitas berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta peran moderasi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden yaitu ASN yang mempunyai tugas sebagai pengelola keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan metode *purphose sampling* yaitu metode pengumpulan data melalui pengisian kuesioner oleh responden. Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji *validitas* dan *reliabilitas instrumen*, uji *asumsi klasik*, uji *f*, uji *R square*, serta analisis regresi moderasi *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian MRA membuktikan bahwa ketiga variabel independen, yaitu perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah di Kabupaten Ponorogo. Secara parsial perencanaan dan variabel transparansi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, sedangkan akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil analisis pengujian interaksi moderasi menunjukkan bahwa pengawasan mampu memperkuat pengaruh perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci : Akuntabilitas; Perencanaan; Pengawasan; Pengelolaan Keuangan Daerah; Transparansi

ABSTRACT

This research aims to analyze the extent to which planning, transparency, and accountability contribute to improving regional financial management performance, as well as the moderating role of supervision in Ponorogo Regency Government. The research method used is quantitative descriptive, with a sample size of 55 respondents, namely civil servants who have the task of managing the finances of Regional Apparatus within the Ponorogo Regency Government. The researcher used purposive sampling, a method of data collection through questionnaires filled out by respondents. Data analysis in this study includes testing the validity and reliability of instruments, classical assumption tests, f-tests, R-squared tests, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the MRA test prove that the three independent variables, namely planning, transparency, and financial management performance in Ponorogo Regency. Partially, planning and transparency variables can have a significant negative impact on regional financial management performance, while accountability does not show a significant influence. The results of the analysis of the moderation interaction test show

that supervision is able to strengthen the influence of planning, transparency, and accountability on regional financial management performance.

Keywords : Accountability; Planning; Supervision; Regional Financial Management; Transparency

PENDAHULUAN

Sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah otonom dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berarti memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga tercapai pemerataan pendapatan. Pemerintah pusat mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal, sehingga pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan cepat dan tepat sasaran. Pembangunan lokal yang sesuai dengan kebutuhan lokal dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengatasi ketidakmerataan pendapatan.

Pengelolaan keuangan sesuai *Good Governance* tentu saja diharapkan memberi dampak yang positif terhadap masyarakat dan dapat menjadikan masyarakat sejahtera karena dalam melaksanakan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Perpaduan antara pola perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan memberikan aparat pemerintah kendali penuh atas segala sesuatu yang mereka lakukan dan menekankan peran pemerintah dalam mendekatkan kinerja pengelolaan fiskal daerah kepada masyarakat. Ada banyak faktor yang menciptakan tata pemerintahan yang baik yang dapat membantu keberhasilan pemerintah yaitu dengan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang terencana dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan LRA pada tahun 2021, 2022 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai permasalahan capaian kinerja yang belum sesuai target, terutama dalam mengelola pendapatan yang menurun pada tahun 2022 dan 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan dari sisi belanja mengalami peningkatan penyerapan pada tahun 2022 dan 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Meskipun realisasi belanja mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, sangat diperlukan suatu penanganan keuangan daerah yang berorientasi pada keberhasilan capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, Renstra, Renja).

(Rantepulung, 2023) dalam penelitiannya membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif yang nyata pada kinerja keuangan di Provinsi Papua. Studi kasus pada Provinsi Papua menunjukkan bahwa pengawasan merupakan faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang baik di tingkat daerah.

(Sitta, Paulus, and Hadiprajitno 2023) dalam penelitiannya menggunakan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sebagai variable independen. Temuan menunjukkan bahwa jika akuntabilitas diterapkan, maka akan berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan anggaran pada pendekatan *value-for-money*, sedangkan transparansi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.

Dengan gagasan anggaran berbasis *value-for-money*, pengawasan yang efektif dapat membantu pemerintah meningkatkan kinerja penggunaan anggaran. Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh (Rantepulung, 2023), kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan dan positive oleh transparansi secara parsial .

Berdasarkan pengelolaan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 sampai dengan 2023, dan penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan studi lebih mendalam. Fokus penelitian adalah perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi pengaruh perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas, melalui variabel moderasi pengawasan, terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Penambahan variabel perencanaan sebagai bentuk keterbaruan dengan penelitian sebelumnya. Diperlukan pengujian untuk menganalisis faktor mana saja yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Diharapkan penelitian dapat memberikan beberapa manfaat dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo, agar dapat mendeteksi faktor mana yang dominan dan dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan sebagai

masuk dalam mengambil kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bagi para pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tugas tambahan sebagai pelaksana penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian dapat menambah wawasan guna mendukung tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pekerjaan.

Masyarakat sebagai *stakeholder eksternal* dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengenali kualitas perencanaan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta lebih terlibat dalam pemantauan kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi signifikan untuk pengembangan teori dan praktik perencanaan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai kerangka konsep *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ruang lingkup penelitian ini mencakup keilmuan manajemen keuangan daerah khususnya mempelajari tentang perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan peran pengawasan pada kinerja anggaran di daerah. Penelitian ini secara khusus membahas tentang pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Teory Agency

Menurut (Jensen, 1976) : “Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu versi dari game theory yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lainnya disebut principal. Principal mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen ataupun principal telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*)”. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terdapat hubungan keagenan (*agency theory*) antara daerah yang menjadi klien dan pemerintah daerah yang menjadi agen.

Kinerja Pengelolaan Keuangan

Menurut (Mahsun 2016), Sistem pengukuran yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, analisis biaya manfaat sosial, dan pertimbangan value-for-money, selain mempertimbangkan aspek finansial langsung dan nyata, juga memperhitungkan aspek non finansial tidak langsung. Hal ini memungkinkan kami memberikan kinerja yang lebih obyektif pengukuran hal-hal yang tidak berwujud. Menurut (Mahsun 2016), input, proses, output, hasil, manfaat, dan dampak merupakan enam karakteristik kinerja pemerintah daerah.

Perencanaan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengutip (Ariesmawati 2020), penganggaran kinerja merupakan jembatan yang menghubungkan perencanaan strategis jangka menengah dengan pelaksanaan anggaran, sehingga sumber daya dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Penganggaran berbasis kinerja adalah sistem yang dirancang untuk mengukur kinerja organisasi, mengalokasikan sumber daya berdasarkan program daripada unit organisasi, serta memungkinkan penyesuaian biaya satuan setiap kegiatan agar lebih sejalan dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Penetapan indikator kinerja *outcome* terkait biaya bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut penelitian (Permata 2023), perencanaan secara individual tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kapasitas penyerapan anggaran di lingkungan kantor wilayah BPN provinsi Jambi.

Hipotesis berdasarkan konsep dan temuan empiris ini, adalah sebagai berikut :

H₁: Perencanaan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), transparansi didefinisikan sebagai "memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi secara terbuka dan tanpa bias", di sisi lain (Adisasmita 2011) menyatakan bahwa transparansi merupakan kondisi dimana pemerintah secara terbuka dan jujur memberikan akses informasi kepada publik mengenai segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rantepulung, Ratang, and Mollet 2023) dengan hasil kinerja pemerintah daerah dipengaruhi positif signifikan secara individu oleh transparansi.

Menurut penelitian (Merchilia, Robinson 2024), transparansi mempengaruhi kinerja keuangan OPD Kota Bengkulu secara negative dan signifikan. Berdasarkan konsep dan temuan empiris, hipotesis yang dapat ditarik sebagai berikut.

H₂: Transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengutip (Mahmudi 2010), akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pejabat publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang efisien dan efektif, tanpa memboroskan atau membuang-buang dana atau menimbulkan korupsi. Seluruh proses penerimaan, transfer, dan pencairan dana di lembaga pemerintah diatur secara ketat oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntabilitas berarti bahwa lembaga publik bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan keuangan mereka, mengungkapkannya, dan mematuhi undang-undang dengan menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait supaya kinerja pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Penelitian oleh (Rantepulung, Ratang, Mollet 2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan konsep dan temuan empiris hipotesis yang dapat ditarik adalah :
H₃: Akuntabilitas berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan Dalam Memoderasi Hubungan Perencanaan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan kinerja menjadi landasan awal dalam manajemen perencanaan yang menetapkan arah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu pengertian perencanaan adalah proses memikirkan dan memutuskan langkah kongret guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Suhadak, 2007).

(Sumarsono 2010) menyampaikan bahwa pengawasan fungsional merupakan “Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun dari lingkungan eksternal pemerintah.” Pengawasan menurut (Siswanto 2009) adalah seluruh kegiatan dan tindakan keuangan untuk menjamin tidak adanya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan pada penyelenggaraan suatu kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan.

Berdasarkan konsep diatas, hipotesis yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

H₄: Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan perencanaan dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah di Kabupaten Ponorogo.

Pengawasan Dalam Memoderasi Hubungan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti diungkapkan oleh (Garung , 2020), transparansi berperan penting dalam memberikan akses publik terhadap informasi yang akurat dan terkini mengenai kebijakan publik dan proses pembuatannya. Informasi adalah kunci bagi masyarakat agar dapat terlibat dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah dan mempunyai hak untuk bertindak sebagai regulator eksternal terhadap kebijakan publik terbaru, sehingga dapat menghasilkan output yang, dan mencegah praktik-praktik curang serta mencegah terjadinya manipulasi data yang dapat menguntungkan kelompok tertentu. Pengawasan erat kaitannya dengan kualitas pelayanan kota. Sebab untuk mencapai keberhasilan visi misi diperlukan pengawasan yang ketat, meliputi perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban atas program kegiatan yang telah direncanakan.

Pengawasan fungsional menurut (Sumarsono 2010) adalah “Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun dari lingkungan eksternal pemerintah.”

Dalam penelitiannya (Putra, 2016), membahas bahwa transparansi dan akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah dengan variabel moderasi pengawasan di Propinsi Sumatra Utara menyatakan bahwa, pengawasan tidak dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh antara transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis yang dapat ditarik berdasarkan konsep dan temuan empiris adalah sebagai berikut.

H₅ : Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan transparansi dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo.

Pengawasan Dalam Memoderasi Hubungan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik memberikan dampak positif pada mekanisme pengelolaan anggaran jika penyampaian pelaporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara jujur, jika integritas dan kepatuhan pada perundang-undangan pengelolaan anggaran yang berlaku terjamin (Natison, 2022).

Dan hal ini diperlukan suatu pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dapat terwujud apa yang menjadi target kinerja dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Pengawasan daerah pada hakikatnya mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan keuangan daerah berjalan efektif dan sesuai dengan aturan. Pengawasan memiliki kaitan yang erat dengan kualitas kinerja penanganan keuangan daerah.

Penelitian (Putra, 2016) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan daerah pada kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan sebagai variabel moderasi di Propinsi Sumatra Utara menunjukkan bahwa variabel moderasi pengawasan tidak berpengaruh signifikan dalam menguatkan atau melemahkan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

Hipotesis berdasarkan konsep dan temuan empiris adalah sebagai berikut.

H₆: Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Hubungan antara variabel penelitian, yaitu perencanaan, transparansi, akuntabilitas, kinerja pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan, disajikan secara visual pada Gambar 1.

Definisi operasional dari semua variabel adalah dasar yang menentukan nilai dari variabel dependen, yakni kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) dan variabel

independen yakni perencanaan (X1), transparansi (X2), akuntabilitas (X3) dan pengawasan sebagai variabel moderating (Z).

Menurut (Mahsun 2016), selain mempertimbangkan aspek keuangan secara langsung dan nyata, sistem pengukuran menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, analisis biaya manfaat sosial, dan money-to-value juga mempertimbangkan aspek non-keuangan seperti: serta memberikan pengukuran kinerja yang lebih obyektif. Itu tidak langsung dan tidak berwujud. Menurut (Mahsun 2016), input, proses, output, hasil, manfaat, dan dampak merupakan enam karakteristik kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan adalah tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan anggaran tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Siswanto 2009). Karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif yang digunakan sebagai indikator adalah akurasi, ketepatan waktu, objektivitas dan komprehensif, difokuskan untuk titik kendali strategis, sesuai prinsip ekonomi yang realistis, sesuai prinsip organisasi yang realistis, disesuaikan dengan arus pekerjaan organisasi, fleksibilitas, sifat preskriptif yang operasional, dan penerimaan dari seluruh anggota organisasi.

Memahami perencanaan (perencanaan dan penganggaran) dari sudut pandang fungsi manajemen sangat penting ketika membuat anggaran, karena ada hubungan erat antara penganggaran dan perencanaan (Suhadak dan Trilakso 2007). Indikator yang digunakan merupakan indikator dilihat dari fungsi manajemen yaitu Perencanaan kinerja dan Anggaran berbasis kinerja. Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap segala informasi pemerintahan, termasuk kebijakan, proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang sudah dicapai. (Mardiasmo 2009) Karakteristik transparansi yang merupakan indikator yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan informasi yang lengkap.

Akuntabilitas adalah kewajiban otoritas publik untuk mengelola sumber daya publik (dana publik) secara bertanggungjawab, hemat biaya dan waktu, tanpa pemborosan atau kehilangan dana, dan tanpa korupsi. Tanggung jawab ini sangat penting karena merupakan jantung masyarakat, (Mahmudi 2015). Indikator yang digunakan merupakan indikator akuntabilitas, dilaksanakan oleh sektor publik termasuk aspek kejujuran dan hukum, manajemen, kebijakan, program, dan keuangan.

Populasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan tupoksi sebagai pelaksana penatausahaan keuangan daerah (PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan) dengan total sebanyak 275 ASN. Penelitian ini menggunakan *purphose sampling* untuk menetapkan sampel penelitian yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) di 55 Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tupoksi sebagai pelaksana penatausahaan keuangan daerah yaitu 55 responden.

Penelitian ini menggunakan etode analisis data dengan alat pengujian SPSS versi 25. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa faktor penyebab atau variabel bebas. Metode ini juga dikombinasikan dengan analisis moderasi (MRA) untuk melihat pengaruh variabel penengah.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil

Berdasarkan tabel 2, variabel perencanaan (X1) memiliki rentang nilai antara 4 hingga 5, dengan rata-rata (mean) 4,3818, dan standar deviasi sebesar 0,4903. Variabel transparansi (X2) memiliki rentang nilai antara 4 hingga 5, nilai rata-rata (mean) 4.3273, dan standar deviasi sebesar 0.47354. Variabel akuntabilitas (X3) menunjukkan rentang nilai antara 4 hingga 5, nilai rata-rata (mean) 4.2909, dan standar deviasi sebesar 0.45837. Variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) memiliki rentang nilai antara 3 hingga 5, nilai rata-rata (mean) 4,200, dan standar deviasi 0,44721. Untuk variabel pengawasan (Z), rentang nilai antara 3 hingga 5, nilai rata-rata (mean) 4,200, dan standar deviasi sebesar 0,4472. Sesuai hasil pengujian statistik deskriptif, nilai standar deviasi relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan bahwa data pada variabel tersebar secara merata.

Hasil Analisis Data

Uji Validitas

Untuk memastikan valid atau tidaknya variabel diperlukan uji validitas dalam suatu penelitian. Menurut (Ghozali Imam 2016) pernyataan dalam kuesioner yang sesuai dengan konsep yang ingin diukur dianggap valid. Dalam hal ini, apabila nilai validitas tinggi maka data yang dihasilkan akurat dengan tujuan penelitian dapat dikatakan tepat dan sesuai. Pengujian validitas menggunakan prosedur melihat angka

item correlated melalui uji statistik SPSS dengan rumus korelasi Pearson dan signifikansi 5% (Sugiyono 2017). Proses penghitungan validitas dilakukan kepada 55 responden dalam penelitian ini. Maka untuk setiap butir kuesioner dapat dikatakan valid apabila tingkat signifikansi $< 0,05$. Apabila yang ditemukan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka butir kuesioner dikatakan tidak valid. Penelitian menunjukkan hasil uji validitas sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 3 yang merupakan hasil uji validitas penelitian, kemudian dilakukan perbandingan antara korelasi pada setiap item variabel dengan nilai signifikansi. Nilai α didapat sebesar 0,05 dengan $N = 55$ responden. Didapat bahwa dari sejumlah 69 item pernyataan pada seluruh variabel memiliki nilai korelasi kurang dari 0,05 yang artinya butir kuesioner valid dan dapat mengungkapkan aspek yang diukur melalui kuesioner. Dalam hal ini kuesioner dapat dikatakan sah dan dapat dipergunakan untuk penelitian.

Uji Realibilitas

Kegunaan pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui variabel dari kuesioner yang digunakan apakah konsisten dan stabil. Menurut Sugiyono (2018) uji reliabilitas melihat konsistensi dan stabilitas dari temuan data, data yang tidak reliabel tidak dapat digunakan dalam penelitian karena kesimpulannya akan bias. Reliabilitas suatu instrument ditunjukkan oleh konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, instrumen penelitian ini dapat dikatakan cukup reliabel, ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,60. Berdasarkan tabel 4 yang memuat data uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa dari keempat variabel; Perencanaan (X_1), Transparansi (X_2), Akuntabilitas (X_3), Pengawasan (Z), dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), semuanya mempunyai nilai realibilitas di atas 0,60. Dari hasil uji reliabilitas, bisa diambil kesimpulan variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik dan stabil, sehingga temuan data yang didapat bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Signifikansi Simultan (F)

Berdasarkan tabel 5, perencanaan, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan hasil nilai F (Sig) adalah 0,000. Nilai signifikansi P kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima dan disimpulkan bahwa variabel perencanaan (X_1),

transparansi(X2), akuntabilitas (X3) secara simultan (bersama sama) mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di daerah (Y) pada taraf sig $\alpha = 5\%$.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan ukuran seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Semakin tinggi nilai R², semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Artinya, setiap perubahan pada variabel bebas akan menyebabkan perubahan pada variabel terkait.

Berdasarkan tabel 6, nilai Adjusted R Square sebesar 0,766. Artinya, variabel perencanaan (X1), transparansi(X2), akuntabilitas (X3) secara bersama sama mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) yaitu sebesar 76,6 %. Sisanya 23,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji interaksi (MRA) adalah analisis regresi yang menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan utama uji ini adalah untuk menilai apakah interaksi antara variabel dengan variabel terikatnya kuat atau lemah, (Gozari, 2016).

Penelitian ini menerapkan analisis regresi moderator (MRA) untuk menguji moderator murni. Hal ini dilaksanakan dengan menambahkan regresi interaksi, meskipun variabel moderator sendiri tidak berfungsi sebagai variabel independen (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusannya adalah : jika probabilitas kurang dari nilai signifikan (Sig $\leq 0,05$), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dianggap signifikan secara statistik. Jika probabilitas lebih besar dari nilai signifikan (Sig $\geq 0,05$), maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.

Hasil persamaan regresi berdasarkan pada Tabel 7 , $Y = 182.131 - 1.773X1 - 1.046X2 - 682X3 + e$, menunjukkan pengaruh perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis (H1) mengatakan bahwa perencanaan (X1) mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) diterima. Jadi kesimpulannya,

perencanaan (X1) secara individual berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan di daerah (Y).

Tingkat transparansi secara signifikan mempengaruhi efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Hipotesis (H1) menunjukkan bahwa transparansi (X2) mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) diterima. Sehingga bisa disimpulkan bahwa transparansi (X2) secara individual berpengaruh negatif signifikan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y).

Akuntabilitas mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan di Kabupaten Ponorogo. Hipotesis (H1) menyatakan bahwa akuntabilitas (X3) mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) ditolak. Kesimpulannya bahwa akuntabilitas (X3) secara individual tidak memiliki pengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y).

Pengawasan mampu memoderasi hubungan perencanaan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa : $Y = 182.131 - 1.773X_1 + 0,025X_1Z + e$. Nilai signifikansi untuk variabel interaksi (X1Z) antara perencanaan (X1) dan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0,001, yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengawasan (Z) bisa mempengaruhi variabel perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan di daerah (Y).

Pengawasan mampu memoderasi hubungan transparansi pada kinerja penanganan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Setelah melakukan, diperoleh hasil persamaan regresi penelitian : $Y = 182.131 - 11.046X_2 + 0,010X_2Z + e$. Nilai signifikansi untuk variabel interaksi (X2Z) antara transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah 0,001, yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan (Z) dapat mempengaruhi variabel transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y).

Pengawasan berperan sebagai variabel moderasi yang menguatkan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Ponorogo. Setelah pengujian hipotesis dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 182.131 - 0.682X_3 + 0.012X_3Z + e$. Nilai signifikansi variabel interaksi (X3Z) antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah 0,045, yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Jadi, pengawasan (Z) dapat meningkatkan

pengaruh variabel akuntabilitas (X3) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y).

Diskusi

Pengaruh Perencanaan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara variabel perencanaan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Proses penyusunan perencanaan kinerja serta anggaran berbasis kinerja yang tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya, menyebabkan perencanaan memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan atau penurunan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Artinya dalam proses perencanaan baik dari perencanaan kinerja ataupun dalam penggunaan anggaran berbasis kinerja, belum seperti yang diharapkan mengacu pada regulasi yang sudah ditetapkan .

Penelitian ini selaras dengan (Permata 2023) yang menyatakan perencanaan secara individual tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya serap anggaran di lingkungan Wilayah BPN Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menandakan bahwa beberapa unit kerja tidak melaksanakan tanggung jawab anggarannya.

Menurut (Suhadak dan Trilaksono Nugroho 2007), ada beberapa tolak ukur diantaranya indikator kinerja, standar satuan harga, analisis standar biaya, dan standar pelayanan (SPM) untuk menilai pelaksanaan sistem anggaran kinerja. Konsep tentang anggaran berbasis kinerja menurut (Ariesmawati 2020) bahwa program atau kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang terukur dan target sasaran yang jelas, dengan mengintegrasikan perencanaan kinerja dan penganggaran.

Manfaat yang diperoleh jika menggunakan perencanaan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, menurut (Ariesmawati 2020) antara lain ini memungkinkan untuk mengetahui tingkat target keluaran dan sejauh mana hasil telah dicapai dan dapat mengidentifikasi keluaran dan hasil dari setiap program. Anggaran berbasis kinerja menekankan pada efisiensi penggunaan biaya (input) untuk mencapai hasil (output) yang telah ditetapkan melalui perencanaan strategis. Setiap unit kerja untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dari penelitian menunjukkan transparansi mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di daerah secara negatif signifikan. Paradigma lama beranggapan

bahwa peningkatan transparansi akan mengakibatkan peran yang berlebihan dari masyarakat, sehingga menyebabkan adanya pembatasan terhadap transparansi itu sendiri. Hal inilah yang membuat transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya terlaksana dan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Sejalan dengan penelitian (Merchilia, Robinson 2024) yaitu Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa transparansi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan OPD Kota Bengkulu. Meskipun transparansi memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja keuangan, namun dalam praktiknya, implementasi transparansi di lapangan masih jauh dari harapan. Keterbukaan anggaran yang dijanjikan pemerintah belum sepenuhnya terwujud, sehingga berdampak negatif pada kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep transparansi yang dikemukakan oleh (Mardiasmo 2009), yang menyatakan bahwa transparansi bukan hanya sekedar keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup akses terhadap proses pengambilan keputusan dan hasil yang dicapai. Menurut (Mardiasmo 2009), transparansi memiliki tiga karakteristik utama. Pertama adalah informatif (*informative*), yakni penyediaan arus informasi yang jelas serta akurat kepada publik memerlukan informasi, mulai dari berita terkini hingga data statistik yang mendukung, dan disampaikan dengan tepat pada waktunya (laporan keuangan yang disajikan tepat waktu sangat krusial untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif di bidang ekonomi, sosial, dan politik). Kemudian memadai, yaitu laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan untuk menjaga kredibilitas sehingga dapat diandalkan dan relevan. Selanjutnya adalah jelas, dimana informasi harus disampaikan secara jelas agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu akurasi merupakan syarat mutlak dalam penyampaian informasi, sehingga tidak menyesatkan orang yang menerimanya. Informasi juga harus dapat dibandingkan, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan instansi lain dan dalam beberapa periode waktu. Dan mudah diakses, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengaksesnya dengan mudah.

Kedua adalah keterbukaan (*openness*), yang berarti setiap warga negara berhak atas akses informasi publik yang mudah dan cepat. Ketiga adalah pengungkapan

(*disclosure*), komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas operasi dan kinerja keuangan dengan menyampaikan kondisi keuangan (gambaran umum tentang keuangan perusahaan selama periode waktu yang ditentukan), susunan pengurus (struktur organisasi yang menunjukkan hierarki yang jelas dan adanya perbedaan kegiatan atau fungsi), dan bentuk kegiatan dan hasilnya (serangkaian langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan).

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil analisis penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Akuntabilitas dalam berbagai aspek seperti hukum, etika, manajemen, program, kebijakan, dan finansial merupakan suatu bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi aktual dilapangan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan penerapan akuntabilitas dapat menjadi pendorong utama peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Penerapan aturan yang ketat mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Akan tetapi semua tersebut diatas belum secara optimal dilaksanakan sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penerapan akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum berjalan seperti yang seharusnya.

Temuan hasil penelitian tidak selaras dengan penelitian (Rantepulung, Ratang, Mollet 2023) yang menyatakan akuntabilitas secara parsial memiliki pengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Dalam pengelolaan anggaran akuntabilitas menjadi sangat penting, dimana seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi keharusan bagi seluruh sektor publik, termasuk pemerintah daerah (Mahmud, 2013). Hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran dikelola menjadi dasar dari tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sektor publik.

Menurut (Mahmudi 2015), akuntabilitas dalam konteks lembaga publik berarti memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien, sehingga tidak

terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Aspek akuntabilitas menjadi sangat krusial karena menjadi fokus utama perhatian publik. Indikator yang digunakan menurut (Mahmudi 2015), indikator akuntabilitas yang wajib dipenuhi oleh organisasi sektor publik meliputi akuntabilitas hukum (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan), akuntabilitas kejujuran (menghindari penyalahgunaan wewenang), akuntabilitas manajerial (efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi), akuntabilitas program (program yang berkualitas membantu strategi organisasi dan mencapai visi serta tujuan), akuntabilitas kebijakan (lembaga publik bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat) dan akuntabilitas finansial (lembaga publik bertanggung jawab menggunakan dan mengelola dana publik secara ekonomis, efektif, efisien, serta menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan pemborosan, kebocoran, atau korupsi).

Pengaruh Perencanaan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variable Moderasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian pengujian pengaruh variabel perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui variabel pengawasan sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi sebagai variabel moderating dalam penelitian ini. Dengan adanya pengawasan oleh APIP dapat memperkuat pengaruh perencanaan terhadap kinerja anggaran daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini tidak sejalan dengan temuan penelitian bahwa gaya kepemimpinan bukan variabel moderasi, karena kepemimpinan terbukti tidak mampu memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dan kapasitas penyerapan anggaran (Permata S, Rahayu, Yudi 2023).

Menurut teori yang dikemukakan (Kadarisman 2013), “Supervisi adalah suatu kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada kinerja suatu pekerjaan. Terjadinya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam kinerja suatu pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat keahliannya Tingginya tingkat keterampilan yang dimiliki pegawai, pegawai yang senantiasa menerima petunjuk dan petunjuk dari atasannya cenderung lebih sedikit melakukan kesalahan dan kekeliruan dibandingkan dengan pegawai yang senantiasa menerima petunjuk dan petunjuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai

dengan aturan organisasi. Tujuannya untuk menentukan apa yang salah sehingga organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran utamanya.

Dalam penelitian ini indikator anggaran berbasis kinerja mendapatkan skor rata-rata terendah terutama dalam penyusunan anggaran sebagian Perangkat Daerah belum menggunakan Analisis Standar Biaya (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah dan pada proses penyusunan anggaran belum semuanya menggunakan Standar Pelayanan (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan. Dalam pengawasan, indikator akurat mendapatkan skor tertinggi. Artinya pengawasan yang dilakukan pengawas internal (Inspektorat) dan pengawas eksternal (BPK) yang mudah mendapatkan Informasi yang akurat atas data kinerja pengelolaan keuangan Perangkat Daerah serta dengan melakukan review terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja maupun dalam penggunaan anggaran berbasis kinerja, maka mampu mendorong Perangkat Daerah untuk mematuhi segala aturan yang berlaku guna peningkatan Kinerja Pengelolaan Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variable Moderasi

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan dalam memaksimalkan dampak positif transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Pengawasan yang efektif oleh APIP mampu mengubah pengaruh negatif transparansi menjadi positif, sehingga berkontribusi signifikan pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Transparansi melalui prinsip informatif, keterbukaan dan pengungkapan dalam era transparansi publik disertai dengan pengawasan mampu berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diukur dari input, proses, output, hasil, manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian oleh (Putra, 2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil tes moderator dengan uji residu, pengawasan tidak mampu memoderasi hubungan antara transparansi dan kinerja pemerintah daerah, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya peran moderasi yang signifikan dari variabel pengawasan.

Sesuai dengan teori yang diungkapkan (Kadarisman 2013), untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan, diperlukan kegiatan

manajerial berupa pengawasan. Tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan yang diberikan oleh atasan. Karyawan yang mendapatkan bimbingan dan arahan yang jelas cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memiliki peran untuk memastikan bahwa semua dijalankan berdasarkan aturan organisasi. Tujuan pengawasan adalah untuk mengevaluasi kesalahan dan memastikan organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran utamanya.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variable Moderasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian, pengaruh variabel akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui variabel pengawasan sebagai variable moderasi menunjukkan bahwa variabel pengawasan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh variabel akuntabilitas terhadap pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Akuntabilitas secara individual tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo, dengan pengawasan dapat memperkuat hubungan akuntabilitas pada kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Penerapan akuntabilitas baik dari sisi hukum, kejujuran, manajerial, program, kebijakan dan keuangan merupakan suatu bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menentukan apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tujuan pengawasan adalah menghindari penyalahgunaan atas tujuan yang ingin dicapai dan mengantisipasi memanfaatkan peluang penyelewengan. Melalui pengawasan, akuntabilitas dapat diperkuat, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2016). Berdasarkan hasil tes moderator dengan uji residu, pengawasan sebagai variabel moderasi tidak terbukti memperkuat atau melemahkan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan teori yang diungkapkan (Siswanto 2009) untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan tidak menyeleweng dari tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adalah tindakan dalam rangka kegiatan pengawasan. Seperti yang dinyatakan oleh (Sumarsono 2010), "untuk menjamin bahwa tindakan dan kegiatan yang dilakukan dilakukan dengan benar diperlukan pengawasan".

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan bahwa perencanaan, transparansi, akuntabilitas secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Perencanaan, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor-faktor penting dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo agar semakin baik dan memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Melalui pengujian hipotesis, hasil analisis penelitian menunjukkan perencanaan dan transparansi berdampak negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo, sementara akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Agar tercipta sinergi dan efektivitas dalam pembangunan daerah, diharapkan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo dapat fokus pada proses perencanaan yang meliputi perumusan, pengendalian, dan evaluasi. Hal ini mencakup evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta tata cara oerubahannya sebagaimana diatur dalam (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Masyarakat harus mudah mendapatkan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik sesuai dengan penerapan prinsip transparansi berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan regulasi tindak lanjut dengan tujuan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo semakin meningkat. Untuk memastikan bahwa visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo tercapai secara efektif, maka diterapkanlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti perencanaan strategis, kinerja, dan pelaporan.

Pengujian MRA menunjukkan bahwa pengawasan dapat memperkuat pengaruh perencanaan, transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel moderating terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sesuai aturan dan target. Visi misi dikatakan berhasil harus melalui pengawasan yang optimal. Peran serta masyarakat dalam memberikan pengawasan baik dalam bentuk memberikan informasi baik itu kritik, saran dan masukan sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah agar dalam menjalankan dan mewujudkan apa yang telah dijanjikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kontribusi masyarakat secara positif akan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

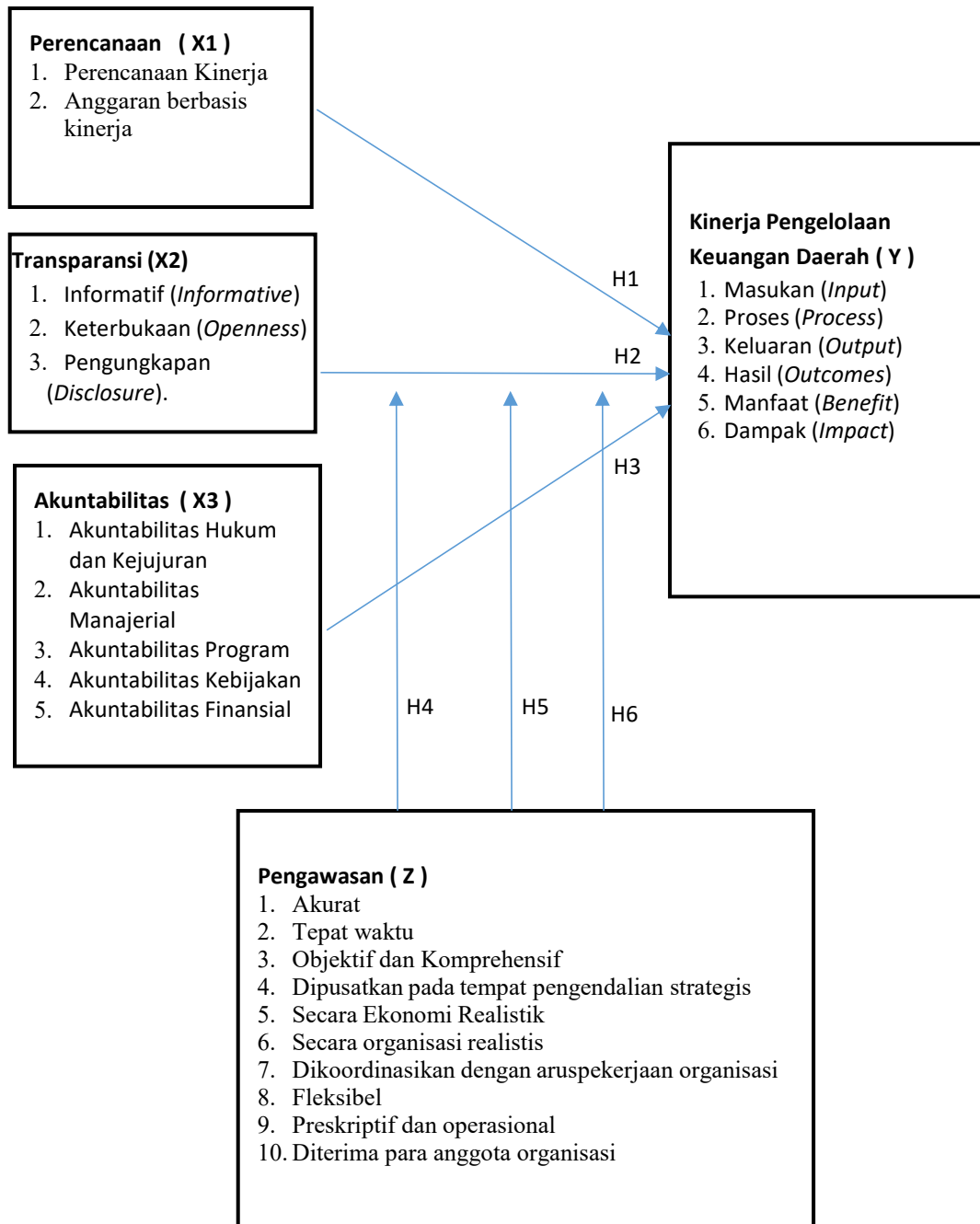
Penelitian ini memiliki keterbatasan, dan bagi peneliti lain agar menggunakan wawancara, untuk memperluas cakupan objek penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh. Variabel lain yang bisa mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di daerah seperti monitoring dan evaluasi, serta Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah, dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Antarajawabarat.
- Ariesmawati, Yulia. 2020. "Pengaruh Perencanaan Dan Penganggaran Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 006 (02): 258–69. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.13>.
- Ghozali Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen and Meckling. 1976. "*Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost Ad Ownership Structure.*"
- Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Edited by Rajawali Pers. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. ; *Manajemen Keuangan Daerah*; Jakarta: Penerbitan, Jakarta : Erlangga, 2010 ; Deskripsi Fisik, Xiv,196 Hlm :Ilus ; Isbn, 9789790751781.
- Mahmudi . 2015 : *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn , Yogyakarta.
- Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Bpfe, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.*; Penerbitan, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009 ; Deskripsi Fisik, 218 ; Isbn, 978-979-29-0779-7.
- Merchilia, Setiandini, and Robinson. 2024. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi

- Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (4): 5326–38. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1134>.
- Nopriansyah Putra, Erlina, dan Tapi Anda Sari. 2016. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variable Pengatur Pada Provinsi Sumatera Utara.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 T tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019.
- Permata S, Nella, Sri Rahayu, and Yudi Yudi. 2023. “Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 7 (2): 105–17. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.19119>.
- “Permendagri No. 86 Tahun 2017.” 2017. Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. www.peraturan.go.id.
- Rantepulung, Orpaniati, Westim Ratang, and J A Mollet. 2023. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dimediasi Oleh Pengawasan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua” 8: 108–33.
- Siswanto, H. B. 2009. *Pengantar Manajemen*. , Bumi Aksara, Jakarta. George R Terry(2000), *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sitta, Barokah, Dewi Paulus, and Theodorus Basuki Hadiprajitno. 2023. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta.” *Diponegoro Journal of Accounting* 12 (4): 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi Unibraw, Malang.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta:Graha Ilmu 2010`.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka penelitian

Sumber : Suhadak ,Trilaksono Nugroho (2007) , Mardiasmo (2009) , Mahmudi (2015) Siswanto (2009) dan Mohamad Mahsun(2012)

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Variabel Independen Perencanaan (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas (X3)	Perencanaan kinerja, Anggaran berbasis kinerja Informatif (<i>Informative</i>), Keterbukaan (<i>Openness</i>), Pengungkapan (<i>Disclosure</i>). Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Finansial
Variabel Dependen Kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y)	Masukan (<i>Input</i>), Proses (<i>Process</i>), Keluaran (<i>Output</i>), Hasil (<i>Outcomes</i>), Manfaat (<i>Benefit</i>) dan Dampak (<i>Impact</i>).
Variabel Moderasi Pengawasan (Z)	Akurat (<i>accurate</i>), Tepat waktu (<i>timely</i>), Objektif dan komprehensif (<i>objective and comprehensible</i>), Difokuskan pada titik pengendalian strategis (<i>focused on strategic control points</i>), Secara ekonomi realistis (<i>economically realistic</i>), Secara organisasi realistis (<i>organizationally realistic</i>), Disesuaikan dengan arus pekerjaan organisasi (<i>coordinated with the flow of work of the organization</i>), Fleksibel (<i>flexible</i>), Preskriptif dan operasional (<i>preskriptif dan operational</i>), Diterima oleh anggota organisasi
Sumber : Suhadak, Trilaksono Nugroho (2007), Mardiasmo (2009), Mahmudi (2015) Siswanto (2009) dan Mohamad Mahsun (2012)	

Tabel 2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimal	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan (X1)	55	4.00	5.00	4.3818	.49031
Transparansi (X2)	55	4.00	5.00	4.3273	.47354
Akuntabilitas (X3)	55	4.00	5.00	4.2909	.45837
Pengawasan (Z)	55	3.00	5.00	4.2000	.44721
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y1)	55	3.00	5.00	4.2000	.44721
Valid N (listwise)	55				

Sumber: SPSS V25

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Signifikansi	(N=55 ; $\alpha = 5\%$)	Hasil
Perencanaan (X ₁)	1	0,000	0,05	Valid
	2	0,000	0,05	Valid
	3	0,003	0,05	Valid
	4	0,000	0,05	Valid
	5	0,000	0,05	Valid
	6	0,000	0,05	Valid
Transparansi (X ₂)	7	0,000	0,05	Valid
	8	0,000	0,05	Valid
	9	0,000	0,05	Valid
	10	0,000	0,05	Valid
	11	0,000	0,05	Valid

Variabel	Item	Signifikansi	(N =55 ; $\alpha = 5\%$)	Hasil
	12	0,000	0,05	Valid
	13	0,000	0,05	Valid
	14	0,000	0,05	Valid
	15	0,000	0,05	Valid
	16	0,000	0,05	Valid
Akuntabilitas (X3)	17	0,000	0,05	Valid
	18	0,000	0,05	Valid
	19	0,000	0,05	Valid
	20	0,000	0,05	Valid
	21	0,000	0,05	Valid
	22	0,000	0,05	Valid
	23	0,000	0,05	Valid
	24	0,000	0,05	Valid
	25	0,000	0,05	Valid
	26	0,000	0,05	Valid
	27	0,000	0,05	Valid
	28	0,000	0,05	Valid
	29	0,000	0,05	Valid
	30	0,000	0,05	Valid
	31	0,000	0,05	Valid
	32	0,000	0,05	Valid
	33	0,000	0,05	Valid
	34	0,000	0,05	Valid
Pengawasan (Z)	35	0,000	0,05	Valid
	36	0,000	0,05	Valid
	37	0,000	0,05	Valid
	38	0,000	0,05	Valid
	39	0,000	0,05	Valid
	40	0,000	0,05	Valid
	41	0,000	0,05	Valid
	42	0,000	0,05	Valid
	43	0,000	0,05	Valid
	44	0,000	0,05	Valid
	45	0,000	0,05	Valid
	46	0,000	0,05	Valid
	47	0,000	0,05	Valid
	48	0,000	0,05	Valid
	49	0,000	0,05	Valid
	50	0,000	0,05	Valid
	51	0,000	0,05	Valid
	52	0,000	0,05	Valid
	53	0,000	0,05	Valid
	54	0,000	0,05	Valid
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	55	0,000	0,05	Valid
	56	0,000	0,05	Valid
	57	0,000	0,05	Valid
	58	0,000	0,05	Valid
	59	0,000	0,05	Valid
	60	0,000	0,05	Valid
	61	0,000	0,05	Valid
	62	0,000	0,05	Valid
	63	0,000	0,05	Valid
	64	0,000	0,05	Valid
	65	0,000	0,05	Valid

Variabel	Item	Signifikansi	(N =55 ; $\alpha = 5\%$)	Hasil
	66	0,000	0,05	Valid
	67	0,000	0,05	Valid
	68	0,000	0,05	Valid
	69	0,000	0,05	Valid

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Kuesioner Realiabilitas	Hasil
Perencanaan (X ₁)	0.890	Reliabel
Transparansi (X ₂),	0.915	Reliabel
Akuntabilitas (X ₃)	0.961	Reliabel
Pengawasan (Z)	0.960	Reliabel
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.966	Reliabel

Sumber: SPSS V25 ,diolah Peneliti, 2024

Tabel 5. Hasil Uji Statistik F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1451.124	3	483.708	60.078	.000 ^b
Residual	410.621	51	8.051		
Total	1861.745	54			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y1)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X₃) , Perencanaan (X₁), Transparansi (X₂)

Sumber: SPSS V25

Tabel 6. Hasil Uji R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.779	.766	2.83750

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X₃) , Perencanaan (X₁), Transparansi (X₂)

Sumber: SPSS V25

Tabel 7. Hasil Pengujian Statistik MRA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	182.13 1	45.109		4.038	.000
Perencanaan (X ₁)	-1.773	.537	-.743	-3.300	.002
Transparansi (X ₂)	-1.046	.271	-.728	-3.864	.000
Akuntabilitas (X ₃)	-.682	.532	-.842	-1.282	.206
Pengawasan (Z)	-1.715	.544	-2.330	-3.152	.003
x1Z	.025	.007	1.667	3.537	.001
x2Z	.010	.003	1.017	3.698	.001
x3Z	.012	.006	2.502	2.061	.045

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y1)

Sumber: SPSS V25